

BAB II

GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

Bab II menjelaskan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian.

2.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

2.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebuah kabupaten yang beradadi provinsi Bengkulu, Indonesia, dengan ibukota kabupaten ada di kecamatan Karang Tinggi. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Pada tahun 2020, penduduk kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah 116.706 jiwa, dengan kepadatan 95 jiwa/km². Kabupaten Bengkulu Tengah secara administrasi termasuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang terletak antara 1010 32'– 1020 8' BT dan 20 5' – 40 LS yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan, dengan jumlah penduduk 116669 jiwa (Sumber : Dukcapil Bengkulu Tengah 30 Juni 2014) dan luas wilayah berdasarkan Geografic Information System (GIS) 1.223,94 Km² Kondisi geografisnya sebagian besar merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian mencapai 541 dpl.

Adapun batas-batas Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Air Napal, Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Sebelah Timur : Kecamatan Ujanmas, Kecamatan Kepahiang, dan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;

Sebelah Selatan : Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

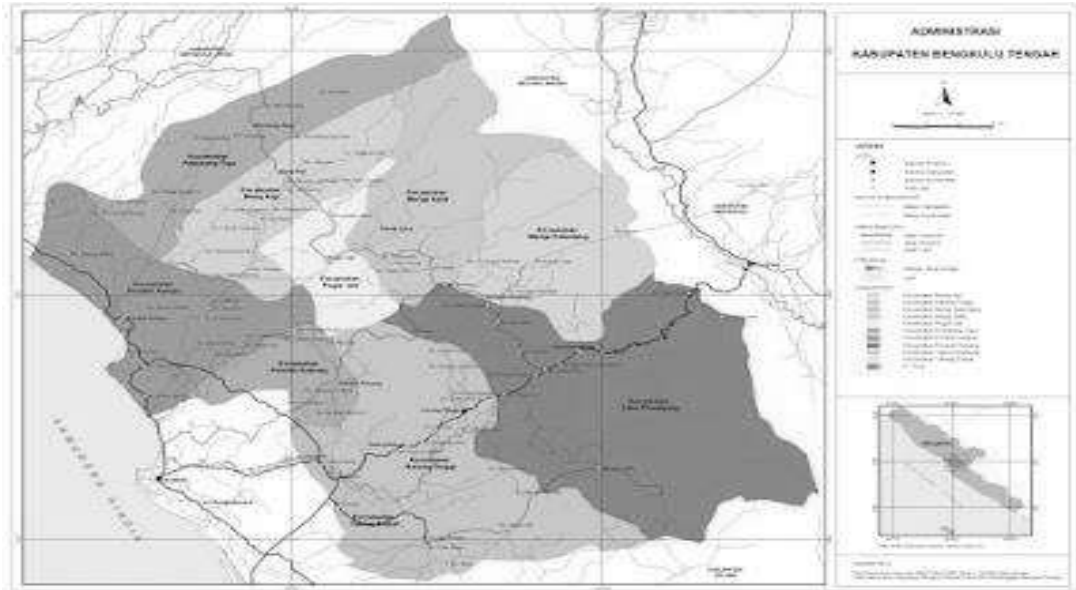
Sebelah Barat : Kecamatan Selebar, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Teluk Pering Samudera Hindia

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Kecamatan	Ibukota kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Talang Empat	Kembang Seri	53,91
2	Semidang Lagan	Lagan Bungin	80,59
3	Karang Tinggi	Ujung Karang	110,59
4	Taba Penanjung	Bajak I	134,38
5	Merigi Kelindang	Lubuk Unen Baru	98,42
6	Pagar Jati	Keroya	188,57
7	Merigi Sakti	Arga Indah II	99,93
8	Pondok Kelapa	Pekik Nyaring	165,20
9	Pondok Kubang	Pondok Kubang	92,00
10	Pematang Tiga	Pematang Tiga	129,64
11	Bang Haji	Sekayun	70,71
TOTAL			1.223,94

Sumber : BPS Kab. Bengkulu Tengah dalam angka 2021

Gambar 2.1
Peta administrasi Bengkulu Tengah



Kabupaten Bengkulu Tengah terletak pada ketinggian 0 – 541 m dpl dengan persebaran sporadis sehingga tofografi wilayah bergelombang dan berbukit dengan derajat kelerengan antara 5 – 35 %. Wilayah yang relatif datar dengan tingkat kelerengan rata-rata 5 % terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa. Lokasi dengan titik tertinggi hingga 541 m dpl berada di kawasan hutan lindung di perbatasan dengan Kabupaten Kepahiang. Sedangkan Daerah terendah terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa dengan ketinggian 0 – 15 m dpl.

2.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 berjumlah 107.791 jiwa meningkat dari tahun 2019 yang berjumlah 106.017 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pondok Kelapa yakni sejumlah

27.632 atau sekitar 25,64 % dari seluruh total penduduk Bengkulu Tengah. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Merigi Sakti yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.821 jiwa. Jumlah penduduk Kecamatan Merigi hanya 5,40 % dari total penduduk Bengkulu Tengah, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 Dengan luas wilayah sekitar 1.223,94 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 88 jiwa/ Km². Penduduk terpadat di Kecamatan Pondok Kelapa dengan tingkat kepadatan 168 jiwa/ Km². Kecamatan Pondok Kelapa menjadi wilayah yang memiliki penduduk terbanyak karena letaknya yang berbatasan dengan kota Bengkulu dan memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dibandingkan dengan kecamatan –kecamatan lainnya.

Tabel 2.2

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Talang Empat	7.963	7.274	15.227
2	Karang Tinggi	6.002	5.734	11.736
3	Taba Penanjung	5.902	5.539	11.441
4	Merigi Kelindang	3.375	3.256	6.631
5	Pagar Jati	3.034	2.996	6.032
6	Merigi Sakti	2.946	2.875	5.821
7	Pondok Kelapa	14.136	13.496	27.632
8	Pondok Kubang	4.660	4.288	8.948
9	Pematang Tiga	3.788	3.718	7.506
10	Bang Haji	3.511	3.306	6.817
TOTAL		56.307	52.482	107.791

Sumber : BPS Kab. Bengkulu Tengah dalam Angka 2020

2.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi

a. Kondisi Sosial

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Secara umum capaian pembangunan manusia Kabupaten Bengkulu Tengah berada di depan capaian beberapa kabupaten lainnya. Pada Tahun 2019 capaian IPM Kabupaten Bengkulu Tengah berada di posisi ke 7

dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Walaupun telah ada kemajuan di beberapa bidang pembangunan, Kabupaten Bengkulu Tengah juga masih banyak menghadapi tantangan dan persoalan pembangunan manusia. Beberapa persoalan pembangunan manusia yang dihadapi Kabupaten Bengkulu Tengah adalah masih rendahnya angka partisipasi sekolah, masih terbatasnya fasilitas pendidikan, disparitas tenaga kesehatan serta kecilnya pendapatan perkapita.

Secara umum tingkat pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah masih harus ditingkatkan karena masih tergolong rendah. Dari target 15 tahun lama sekolah, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bengkulu Tengah sejak tahun 2010 hingga 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan yaitu pada angka 6 -7 tahun yang berarti berada sekitar kelas 1 SMP. Kesehatan merupakan faktor penting pembangunan manusia dan menjadi dasar bagi pembangunan bidang lainnya. Manusia yang sehat merupakan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan yang berfokus pada manusia. Dengan demikian maka investasi sumber daya manusia melalui kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan siklus hidup (*lifecycle approach*) yang dimulai sejak sebelum bayi lahir sampai tumbuh menjadi generasi yang sehat. Indikator yang digunakan untuk mencerminkan status kesehatan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan

Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 67,57 dan pada Tahun 2014 menjadi 67,61. Konsumsi riil per kapita memberikan gambaran tingkat daya beli masyarakat. Sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah, variabel ini sangat penting karena dapat mempengaruhi derajat kesehatan untuk meningkatkan umur harapan hidup serta kemampuan menyekolahkan anak. Mengingat kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda, maka agar kemampuan daya beli masyarakat ini dapat dibandingkan harus dibuat standarisasi. Standarisasi ini dilakukan dengan penyesuaian terhadap disparitas daya beli (*Purchasing Power-PPP*). Pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Pengeluaran perkapita disesuaikan penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 7,8 juta/orang/tahun. Setiap tahun pengeluaran perkapita ini mengalami kenaikan.

b. Kondisi Ekonomi

Salah satu indikasi keberhasilan pembangunan adalah tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan melalui laju pertumbuhan penduduk

PDRB suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 adalah 5,89 %. Di Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata ekonomi Provinsi Bengkulu yaitu 5,49 %. Sektor yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi adalah sektor jasa-jasa dan perdagangan, hotel dan restoran, sementara sektor dengan laju pertumbuhan terkecil pada tahun 2019 adalah sektor pertambangan.

2.2 Gambaran Umum BKKBN Provinsi Bengkulu

BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322).

Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa penduduk

sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Pasal 56 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

BKKBN mempunyai fungsi secara garis besar antara lain adalah perumusan kebijakan nasional; penetapan norma, standar, prosedur, dan

kriteria; pelaksanaan advokasi dan koordinasi; penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dasar hukum terkait tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2.2.1 Struktur Organisasi

BKKBN mengalami perubahan organisasi yang cukup dinamis melalui proses restrukturisasi sebagaimana tampak dari perubahan peraturan yang menjelaskan tugas pokok fungsi, tata kerja, dan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN No.72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan BKKBN, kemudian diubah dalam Peraturan Kepala BKKBN No. 273/per/2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/Per/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. Perubahan terakhir pada bulan Juli 2020 yang dituangkan dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN yang baru. Perubahan dilakukan seiring dengan penyetaraan Jabatan Administrator ke Jabatan Fungsional yang kondisi ideal seharusnya dilakukan restrukturisasi dulu baru dilakukan penyetaraan Jabatan Administrator ke Jabatan Fungsional.

Perubahan peraturan mengenai organisasi dan tata kerja Perwakilan BKKBN Provinsi belum dikeluarkan atau ditetapkan, meskipun telah dilakukan pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional sampai ke unit kerja Eselon II di Provinsi, sehingga dasar hukum SOTK Perwakilan BKKBN Provinsi masih mengacu pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/ 2011. Sebagaimana tertuang dalam Perka tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN di provinsi.

Tabel 2.3

Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu

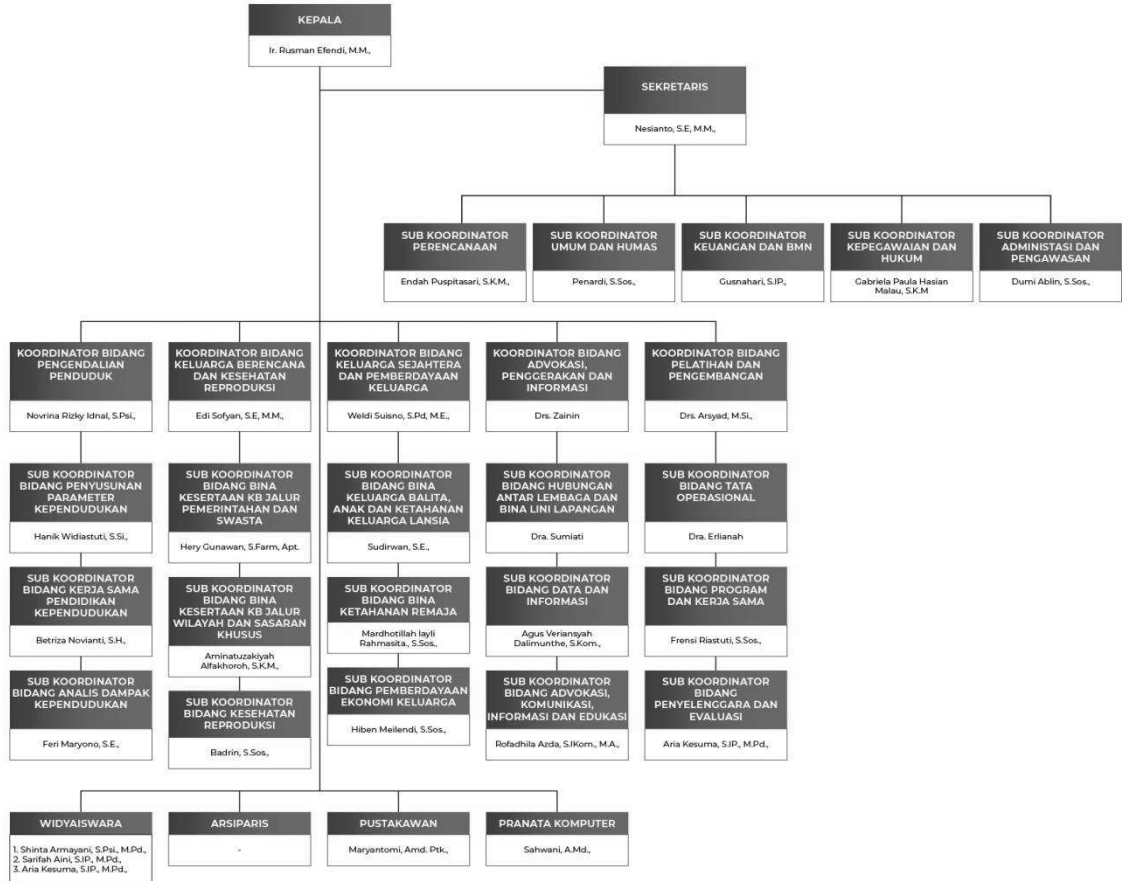
No	Jabatan	Nama	Sub Bagian
1	Kepala	Ir. Rusman Effendi, MM	-
2	Sekretaris	Nesianta, S.E., MM	a. Subbagian Perencanaan b. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; c. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; d. Subbagian Kepegawaian dan Hukum e. Subbagian Administrasi Pengawasan
3	Bidang Pengendalian Penduduk	Drs. Agus Supardi	a. Subbidang Penyusunan Parameter Pengendalian Penduduk; b. Subbidang Kerja Sama Pendidikan Kependudukan; c. Subbidang Analisis

			Dampak Kependudukan.
4	Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Edi Sofyan, SE., MM	<ul style="list-style-type: none"> a. Subbidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah dan Swasta; b. Subbidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus; c. Subbidang Kesehatan Reproduksi
5	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Drs. Arsyad, M. Si	<ul style="list-style-type: none"> a. Subbidang Bina Keluarga Balita, Anak, dan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia. b. Subbidang Bina Ketahanan Remaja. c. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
6	Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi	Drs. Zaren	<ul style="list-style-type: none"> a. Subbidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi; b. Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan; c. Subbidang Data dan Informasi
7	Bidang Pelatihan dan Pengembangan	Drs. Agus Supardi	<ul style="list-style-type: none"> a. Subbidang Tata Operasional. b. Subbidang Program dan Kerja Sama. c. Subbidang Penyelenggaraan dan Evaluasi.

Gambar 2.4



**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI BENGKULU**



Visi

Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Misi

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.

2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

5 Nilai BKKBN

1. **Cerdas** adalah perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
2. **Tangguh** adalah perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan.
3. **Kerjasama** adalah perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama.
4. **Integritas** adalah perilaku untuk berbuat jujur, terbuka, dan konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan.
5. **Ikhlas** adalah perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan sungguh-sungguh.

2.3 Gambaran Umum Program Generasi Berencana

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) memiliki sebuah program unggulan yang salah satunya menyasar kepada generasi

milennial, yaitu Program Generasi Berencana atau yang biasa disebut Program GenRe. Program GenRe merupakan suatu program yang dikembangkan dan dilaksanakan untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar tercapai tegar remaja sehingga ke depan dapat mewujudkan tegar keluarga demi terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Sasaran pelaksanaan program GenRe meliputi dua hal diantaranya adalah melalui pendekatan kepada remajanya langsung (generasi millennial) yang melalui kegiatan PIK-R dan pendekatan kepada keluarga yang mempunyai anak berusia remaja melalui wadah Bina Keluarga Remaja (BKR).

Generasi berencana pertama kali di cetuskan pada tahun 2012 oleh BKKBN pusat. Generasi Berencana adalah sebuah program dari BKKBN dan DPP-KB, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Seksi Bina Ketahanan Remaja yang memegang peran dalam program generasi berencana ini, program genre meliputi delapan substansinya :

Delapan substansi tersebut adalah program inti dari GenRe dengan inti utamanya adalah mempersiapkan Kehidupan Bekeluarga Bagi Remaja (PKBR). Adapun Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK) adalah wadah dari program GenRe tersebut.

1. BKR (Bina Keluarga Remaja)

Berdirinya kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) sebagai strategi pendekatan terhadap orang tua dari program GenRe yang dilakukan oleh

sekelompok keluarga/orangtua untuk meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas juga harus terus mendapat perhatian dari semua pihak terutama orang tua dan tokoh masyarakat.

Pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Melalui kelompok BKR setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja, meliputi Kebijakan Program GenRe.

Penanaman Nilai-Nilai Moral Melalui 8 Fungsi Keluarga yang meliputi:

- **Fungsi Agama** lewat pemberian nilai-nilai keagamaan yang baik sebagai bekal hidup.
- **Fungsi Budaya**, keluarga harus mampu menanamkan penguninya untuk hidup sebagai makhluk sosial yang saling interaksi yang baik antara satu sama lainnya.
- **Fungsi Cinta dan Kasih Sayang** yang diberikan orang tua kepada anak/remaja akan menghantarkan mereka untuk belajar bukan saja hanya menyayangi tetapi juga belajar menghargai orang lain.

- **Fungsi Perlindungan**, keluarga hendaknya tempat berlindungnya remaja di mana di dalamnya ditemukan rasa aman serta nyaman.
- **Fungsi Reproduksi**, remaja lewat keluarganya diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga serta melindungi dirinya lewat pemahaman fungsi reproduksi secara sehat dan benar lewat pernikahan yang sah, teguh dalam menjaga kesucian reproduksinya hingga menikah kelak.
- **Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan** diharapkan memberikan pemahaman terhadap remaja akan pentingnya hidup bersosialisasi dengan baik dan benar, karena sejatinya manusia membutuhkan satu dan lainnya.
- **Fungsi Ekonomi**, keluarga hendaknya dapat memberikan pemahaman pentingnya mencari sumber pemasukan yang baik serta menggunakannya dengan baik pula lewat tindak hidup hemat dan menabung.
- **Fungsi Lingkungan**, keluarga hendaknya dapat mengaktualisasikan dirinya lewat bersikap bersih dan disiplin

2. Pendewasaan Usia Perkawinan, dengan meningkatkan usia perkawinan pertama dengan minimal usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki. Merencanakan kerangka masa reproduksi dengan merencanakannya sebaik mungkin lewat tiga masa reproduksi, yaitu menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan serta masa mencegah kehamilan.

3. Pemahaman yang benar akan seksualitas serta bahaya NAPZA, HIV dan AIDS,

4. Memiliki Keterampilan Hidup, yang mampu menghantarkan remaja untuk berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan yang memungkinkannya seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya.

5. Ketahanan Keluarga Berwawasan Gender, Keluarga memiliki fungsi strategis untuk menanamkan nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas keluarga, karena dalam keluargalah semua struktur, peran, fungsi sebuah sistem berada. Lewat kemajemukan ini semua diharapkan ketahanan keluarga dapat tercipta dengan sebaiknya.

6. Komunikasi Efektif Orangtua terhadap Remaja, komunikasi merupakan cara menyampaikan pemikiran dan bahasa lewat bahasa, mendengar, gerak tubuh dan ungkapan perasaan. Komunikasi yang baik dan efektif antar orang tua akan menghantarkan remaja menuju gerbang kehidupannya dengan baik.

7. Peran Orangtua Dalam Pembinaan Tumbuh Kembang Remaja, peranan orang tua dalam membimbing remaja dalam masa tumbuh kembangnya remaja sangat penting dengan meningkatkan rasa percaya dirinya, memotivasinya serta serta mampu mandiri mengatasi persoalan-persoalan

hidup sang remaja. Maka di sini penting orang tua untuk bersikap sebagai pendidik, sebagai panutan, sebagai pendamping, sebagai konselor, sebagai komunikator sekaligus juga sebagai teman dan sahabat.

8. Kebersihan dan Kesehatan Diri Remaja, Keluarga memegang peranan penting untuk mengajarkan pentingnya remaja menjaga kesehatannya mulai dari seluruh anggota tubuhnya hingga termasuk kebutuhan istirahat dan olah raganya.

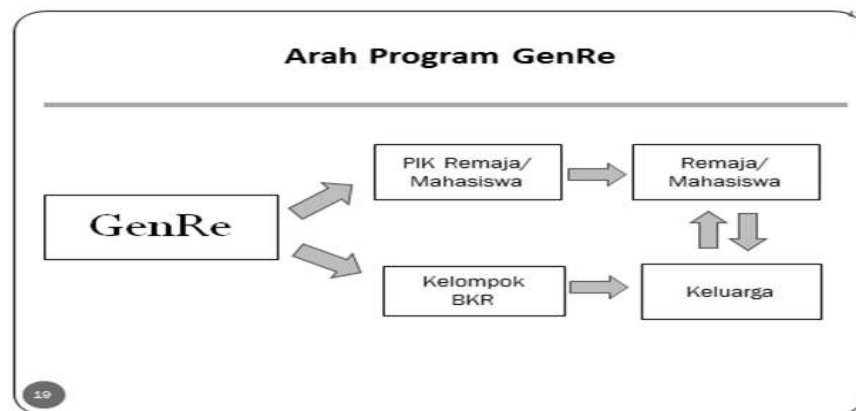
9. Pemenuhan Gizi Remaja. perubahan anak menuju remaja secara otomatis akan mengalami perubahan pola makan pula, pentingnya memberikan pemahaman kepada remaja untuk mengenal pola makan sehat serta tidak terpengaruh oleh pola hidup yang tidak sehat. Sikap hidup remaja termasuk didalamnya keinginan untuk memiliki tubuh yang ideal harus diarahkan pada pola makan/diet yang sehat.

4 strategi program Generasi Berencana :

1. Penataan dan penyerasian kebijakan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
2. Peningkatan komitmen dan peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

3. Penggerakan dan pemberdayaan stakeholder, mitra kerja, keluarga dan remaja dalam program GenRe dalam rangka persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola, PS, KS dan kader program GenRe dalam rangka persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

Gambar 2.2



Tujuan dan Sasaran GenRe

Remaja usia (10-24 tahun) dan belum menikah, mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah, keluarga yang memiliki remaja serta, masyarakat yang peduli terhadap remaja sebagai sasaran utama dari program GenRe harus masuk dan terlibat langsung dan memahami pentingnya akan tujuan dari program keluarga Berencana (GenRe).

2.4 Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat

perkawinan. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap/dewasa dari ekonomi, kesehatan, mental/psikologi.

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program Pendewasaan Usia kawin dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun. Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari empat masa reproduksi, yaitu: 1) Masa menunda perkawinan dan kehamilan, 2) Masa mencegah kehamilan dan 3) Masa menjarangkan kehamilan, 4) Masa mengakhiri kehamilan.

I. Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Elizabeth mengungkapkan (Elizabeth B. Hurlock, 1993, h. 189) bahwa laki-laki, organ pendewasaan usia perkawinan dan hak-hak reproduksi bagi

remaja di usia 14 tahun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Setelah dewasa, ukuran dan proporsi tubuh dan organ reproduksi berkembang. Bagi laki-laki, kematangan organ reproduksi terjadi pada usia 20 atau 21 tahun. Organ reproduksi perempuan tumbuh pesat pada usia 16 tahun.

Pada masa tahun pertama menstruasi dikenal dengan tahap kemandulan remaja, yang tidak menghasilkan ovulasi atau pematangan dan pelepasan telur yang matang dari folikel dalam indung telur. Organ reproduksi dianggap sudah cukup matang di atas 18 tahun, pada usia ini rahim (uterus) bertambah panjang dan indung telur bertambah besar. Dalam masa reproduksi, usia di bawah 20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Usia ini seorang remaja masih dalam proses tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis. Proses pertumbuhan berakhir pada usia 20 tahun, argumentasi ini maka dianjurkan perempuan menikah pada usia 20 tahun. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia tersebut, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 20 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi.

II. Masa Mencegah Kehamilan

Perempuan yang menikah pada usia kurang dari 20 tahun dianjurkan menunda kehamilannya sampai usianya minimal 20 tahun. Untuk menunda kehamilan pada masa ini ciri kontrasepsi yang diperlukan adalah kontrasepsi

yang mempunyai reversibilitas dan efektivitas tinggi. Kontrasepsi yang dianjurkan kondom, Pil, IUD, implan dan suntik.

III. Masa Menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada umur 20-35 tahun, merupakan periode yang paling baik untuk hamil dan melahirkan karena resiko paling rendah bagi ibu dan anak. Jarak ideal untuk menjarangkan kehamilan adalah 5 tahun, sehingga tidak ada 2 balita dalam 1 periode. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan baik dan benar. Semua kontrasepsi, yang dikenal sampai sekarang dalam program Keluarga Berencana Nasional, pada dasarnya cocok untuk menjarangkan kelahiran. Akan tetapi dianjurkan setelah kelahiran anak pertama langsung menggunakan alat kontrasepsi spiral (IUD).

IV. Masa Mengakhiri Kehamilan

Masa mengakhiri kehamilan, berada pada usia PUS di atas 35 tahun, sebab secara empirik diketahui melahirkan anak di atas 35 tahun banyak mengalami resiko medic.